



**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF  
INDONESIA (ZEEI)**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Perikanan  
Nomor: 73/Pid-Sus-Prk/2017/PN.Ranai)**

**TESIS**

**GANJIL SUNARTO**

**1810622053**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2020**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Ganjil Sunarto  
NRP : 1810622053  
Tanggal : 25 November 2020

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 25 November 2020

Yang Menyatakan,



Ganjil Sunarto

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ganjil Sunarto  
NRP : 1810622053  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pengakuan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan Di Zona  
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Kasus Putusan Pengadilan Perikanan  
Nomor: 73/Pid-Sus-Prk/2017/PN.Ranai)**

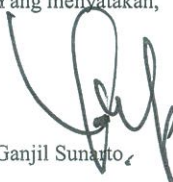
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 25 November 2020

Yang menyatakan,



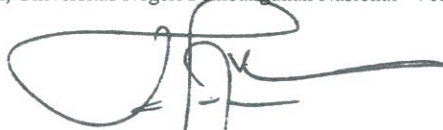
Ganjil Sunarto

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Ganjil Sunarto  
NRP : 1810622053  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Kasus Putusan Pengadilan Perikanan Nomor: 73/Pid-Sus-Prk/2017/PN.Ranai)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



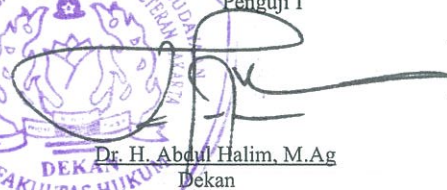
Dr. Abdul Halim, M. Ag  
Ketua Penguji



Dr. Wicipto Setiadi, SH.,MH  
Penguji I



Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH  
Penguji / Pembimbing II



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag  
Dekan



Dr. Beni Harmoni Harefa, SH.,LLM  
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 25 November 2020

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Perikanan Nomor:  
73/Pid-Sus-Prk/2017/PN.Ranai)**

**GANJIL SUNARTO**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan penindakan terhadap tindak pidana perikanan pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ranai dalam sistem hukum Indonesia. Dan untuk menjelaskan tentang mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. *Teori yang digunakan* adalah teori kehendak, teori penegakan hukum dan teori pemidanaan. *Metode penelitian* yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan hukum normatif akan dianalisa norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam berbagai putusan pengadilan yang berisi putusan Perbuatan melawan hukum yang berasal dari perjanjian sewa beli. *Hasil penelitian*, bahwa pada pelaksanaan penindakan terhadap tindak pidana perikanan pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dari terjadinya kejahatan dan pelanggaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan merujuk pada ketentuan Bab XIV Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dilakukan dengan melaksanakan penyidikan, penuntutan, barang bukti dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan. *Simpulan*, dirumuskan bahwa pengaturan penindakan terhadap tindak pidana perikanan dalam sistem hukum Indonesia tidak efektif dalam menanggulangi perbuatan pencurian ikan (*illegal fishing*) yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) disebabkan karena di dalam praktik pemidanaan terhadap ketentuan tindak pidana perikanan masih terdapat perlakuan khusus bagi pelaku tindak pidana perikanan berkewarganegaraan asing yang tidak menimbulkan efek jera. Untuk mengatasi kendala dalam penindakan terhadap tindak pidana perikanan guna meningkatkan penegakan hukum maka diperlukan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjalin perjanjian bilateral dengan negara-negara lain sehingga dapat diterapkan pemidanaan yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana berkewarganegaraan asing yang melakukan perbuatan pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

**LAW ENFORCEMENT IN THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTIONS  
OF FISHERY IN THE INDONESIAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEEI)  
(Case Study of Fisheries Court Decision Number:  
73 / Pid-Sus-Prk / 2017 / PN.Ranai)**

**GANJIL SUNARTO**

**ABSTRACT**

This research was conducted to find out and explain about the regulation of prosecution for fisheries crime in Decision Number 73 / Pid.Sus-Prk / 2017 / PN Ranai in the Indonesian legal system. And to explain about overcoming obstacles in law enforcement against fisheries crime. The theory used is will theory, law enforcement theory and punishment theory. The research method used is normative legal research, with a normative legal approach to analyze the norms of the applicable law, which are contained in statutory regulations and also in various court decisions containing decisions on illegal acts originating from the rental purchase agreement. The results of the study, that in the implementation of prosecution against fisheries crime, the regulation is based on Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries from the occurrence of crimes and violations as stated in Article 103 of Law Number 31 of 2004 jo. Law Number 45 of 2009. Law enforcement in fisheries crime refers to the provisions of Chapter XIV of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries with several amendments based on Law Number 45 of 2009 carried out by carrying out investigations, prosecutions, evidence and examination at the fisheries court hearing. In conclusion, it is formulated that the regulation of prosecution against fisheries crime in the Indonesian legal system is not effective in tackling illegal fishing that occurs in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) because in the practice of criminalization against the provisions of fisheries crime there is still treatment. especially for foreign fisheries perpetrators that do not cause a deterrent effect. To overcome obstacles in prosecution of fisheries crime in order to improve law enforcement, it is necessary to make efforts by the Government of Indonesia to enter into bilateral agreements with other countries so that penalties can be applied which can have a deterrent effect on foreign criminals who commit illegal fishing. (illegal fishing) in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI).

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas segala karunia dan Ridho-Nya, sehingga Tesis degan judul “PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Perikanan Nomor : 73/Pid-Sus-Perk/2017/PN. Ranai)” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Di dalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis banyak mmperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya khususnya kepada yang terhormat para pembimbing : Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH dan Dr. Wicipto Setyadi, SH.,MH.

Perkenankanlah juga Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam peyelesaian studi ini, kepada :

1. Dr. Abdul Halim, M.Ag, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Dr. Beniharmoni Harefa, SH. LLM, Kaprodi Hukum Program Magister Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara yang telah memberikan kesempatan, perhatian, dorongan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan menyusun Tesis;
4. Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai atas kebijakan memberikan Putusan Nomor : 73/Pid-Sus-Prk/2017/PN.Ranai, sebagai materi studi kasus penyusunan Tesis;
5. Doa dan Salam untuk yang tercinta almarhum dan almarhumah; ayahanda, ibunda dan isteri (Faridah Indriyati, BA) semoga telah tenang dan berbahagia disisi-Nya;

6. Anak, Menantu dan Cucu (Amalia, Bima, Icha dan Kiya) yang penuh dengan perhatian, memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis;
7. Rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana khususnya kelas Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Rekan-rekan kerja di PN. Jakarta Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus, jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan. Penulis juga dengan hati terbuka untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan Tesis ini.

Jakarta, Januari 2021

Penulis,

GANJIL SUNARTO.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Teoritis.....	11
1.6 Kerangka Konseptual.....	20
1.7 Metode Penelitian.....	21
1.8 Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
2.1 Penegakan Hukum.....	23
2.2 Tindak Pidana.....	26
2.3 Tindak Pidana Perikanan.....	34
2.4 Putusan Pengadilan Perikanan.....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	67
3.2 Pendekatan Penelitian.....	67
3.3 Sumber Data.....	68
3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	69
3.5 Teknik Analisa Data.....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
4.1 Deskripsi Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 73/Pid-Sus-Prk/2017 PN Ranai.....	71
4.2 Pembahasan.....	96
4.2.1 Pengaturan Penindakan terhadap Tindak Pidana Perikanan pada Putusan Nomor 73/Pid-Sus-Prk/2017 PN Ranai dalam Sistem Hukum Indonesia.....	96
4.2.2 Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan di Indonesia.....	106

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
5.1	Kesimpulan.....	115
5.2	Saran.....	115
<b>DARTAR PUSTAKA.....</b>		<b>117</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		